

**PENETAPAN KONTEKS TUJUAN/STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nama Pemda	:	Provinsi Kalimantan Barat	
Tahun Penilaian	:	2021	
Periode yang dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2019-2023	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	
Peran OPD	:	Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta di bidang pertanahan	
Sumber Data	:	Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	
Tujuan Strategis	:	1 Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi	
		2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan	
		3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance	
Sasaran Strategis	:	1 Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi yang tertangani	
		2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum daerah dan perbatasan	
		3 Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	
IKU Renstra OPD	IKU		2023
	1	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Provinsi	100%
	2	Jumlah peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum kawasan permukiman perkotaan, perdesaan dan perbatasan	14 Kab/Kota
	3	Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan di pertanahan	100%
Informasi Lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis :		
	Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi		
	Sasaran Strategis :		
	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi yang tertangani		
	Sasaran Strategis :		
Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Provinsi			

Pontianak, November 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Barat



PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN OPERASIONAL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nama Pemda	:	Provinsi Kalimantan Barat	
Periode yang dinilai	:	2021	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	
Peran OPD	:	Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta di bidang pertanahan	
Sumber Data	:	Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	
Tujuan Strategis	:	1 Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi	
	:	2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan	
	:	3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance	
Program PD Prov. Kalbar (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	:	1 Pengembangan Perumahan	
	:	2 Kawasan Permukiman	
	:	3 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
	:	4 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	
	:	5 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
Keluaran/Hasil Kegiatan	:	1 Persentase Ketersediaan an terehabilitasinya rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi beserta PSU nya	100%
	:	2 jumlah Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	14 Kab/Kota
	:	3 jumlah kab/kota yang tertangani PSU	14 Kab/Kota
	:	4 Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum	100%
	:	5 Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%
Informasi Lain			
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	:	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
	:	2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
	:	3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
	:	4 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
	:	5 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
	:	6 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
	:	7 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	
	:	8 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

Pontianak, November 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

HENDRA BACHTIAR, ST, MT
Pembina Tk.I
NIP. 19691213 199403 1 005

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nama Pemda		Provinsi Kalimantan Barat								
Nama OPD		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat								
Tahun Penilaian		2021								
Periode yang dinilai		Periode RPJMD Tahun 2019-2023								
Tujuan Strategis		Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi								
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan								
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance								
Urusan Pemerintahan		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan : Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Provinsi	Data perumahan dilokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi tidak valid	RSO.21.04.04.01	Kepala Dinas	Belum lengkapnya data lokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi	Internal dan External	C	Kurang optimalnya pendataan rumah lokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi	Dinas Perkim Prov, Dinas Perkim Kab/kota, Masyarakat
	Sasaran Strategis OPD : Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi yang tertangani	Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi yang direhab atau dibantu beserta PSU nya / Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi beserta PSU nya x 100%								

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan	Jumlah peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum kawasan permukiman perkotaan, perdesaan dan perbatasan	Koordinasi pengembangan kawasan permukiman tidak optimal	RSO.21.04.04.02	Kepala Dinas	Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan kawasan permukiman	Internal dan External	C	Terlambatnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik	Masyarakat
	Sasaran Strategis OPD : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum daerah dan perbatasan	Jumlah Kab/Kota yang tertangani PSU	Dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP) Kab/Kota belum sesuai standar sehingga harus di tinjau ulang	RSO.21.04.04.03	Kepala Dinas	Kurang Akuratnya Kualitas dari Dokumen RP3KP	Internal dan External	C	Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman belum optimal	Masyarakat

3	Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance :	Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan di pertanahan	Tidak terlaksananya pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	RSO.21.04.04.04	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap aturan di bidang	Internal dan External	C	Tidak tercapainya tata kelola administrasi	Masyarakat dan OPD
---	---	---	--	-----------------	--------------	---	-----------------------	---	--	--------------------

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sasaran Strategis OPD : Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	secara optimal			pertanahan dan dukungan dari OPD terkait			pertanahan yang optimal	

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Barat										
Nama OPD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat										
Tahun Penilaian	2021										
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2019-2023										
Tujuan Strategis	Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi										
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan										
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance										
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan										
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/UC	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Data Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Perencanaan	Data perumahan dilokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi tidak valid	ROO.21.0 4.04.01	Kasi	Belum lengkapnya data rumah lokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi	External dan Internal	C		
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi yang tersosialisasi	Perencanaan	Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi kurang optimal	ROO.21.0 4.04.02	Kasi	Kurangnya pemahaman peserta sosialisasi terkait perumahan dan kawasan permukiman	External	C		

3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang dibangun dan direhab beserta PSU	Pelaksanaan	Kurangnya kualitas hasil pekerjaan fisik Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	ROO.21.0 4.04.03	Kasi	Kurangnya kompetensi tenaga terampil setempat	External	C	
4	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Telaksananya Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan Provinsi	Pelaksanaan	Koordinasi pengembangan kawasan permukiman tidak optimal	ROO.21.0 4.04.04	Kasi	Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan kawasan permukiman	External dan Internal	C	
5	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan	Terhambatnya Pelaksanaan Pekerjaan Kawasan Permukiman Kumuh	ROO.21.0 4.04.05	Kasi	1. Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan kawasan permukiman 2. Belum Memvalidasi Data RTLH Tiap Daerah	Internal dan eksternal		
6	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Terlaksananya Pelaksanaan PSU Permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi.	Pelaksanaan	Terlambatnya Pelaksanaan Pekerjaan PSU	ROO.21.0 4.04.06	Kasi	Terlambatnya Proses perencanaan teknis	Internal dan eksternal	C	

Rendahnya kualitas Rumah layak huni yang terbangun	Masyarakat
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Kurang Optimal	Masyarakat
Tidak tercapainya target peningkatan kualitas PSU di kawasan permukiman Kumuh	Masyarakat
Tidak tercapainya target peningkatan kualitas PSU di kawasan permukiman	Masyarakat

tahap penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak tepat waktu	masyarakat, panitia pelaksana pengadaan tanah dan instansi yang memerlukan tanah
terhambatnya proses penyelesaian sengketa tanah	masyarakat dan pihak te rkait

HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Barat				
Nama OPD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan				
Tujuan Penilaian	Mengendalikan risiko- risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD), dan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD				
Tujuan Strategis	Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi				
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan				
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance				
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Tidak tertanganinya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program provinsi	RSP.21.04.04.01	1	1	1
2	Belum terpenuhinya target terhadap PSU di kawasan permukiman	RSP.21.04.04.02	1	2	2
3	Penyelesaian proses administrasi pertanahan belum optimal	RSP.21.04.04.03	2	1	2
II	Risiko Strategis PD				
	Data perumahan dilokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi tidak valid	RSO.21.04.04.01	2	1	2
	Koordinasi pengembangan kawasan permukiman tidak optimal	RSO.21.04.04.02	1	2	2
	Dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP) Kab/Kota belum sesuai standar sehingga harus di tinjau ulang	RSO.21.04.04.03	1	3	3

	Tidak terlaksananya pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara optimal	RSO.21.04.04.04	3	1	3
III	Risiko Operasional				
	Data perumahan dilokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi tidak valid	ROO.21.04.04.01	3	1	3
	Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi kurang optimal	ROO.21.04.04.02	2	1	2
	Kurangnya kualitas hasil pekerjaan fisik Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	ROO.21.01.08.03	2	2	4
	Koordinasi pengembangan kawasan permukiman tidak optimal	ROO.21.01.08.04	2	2	4
	Terhambatnya Pelaksanaan Pekerjaan Kawasan Permukiman Kumuh	ROO.21.01.08.05	2	2	4
	Terlambatnya Pelaksanaan Pekerjaan PSU	ROO.21.01.08.06	2	2	4
	terlambatnya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	ROO.21.01.08.07	3	1	3
	tidak tercapainya penyelesaian sengketa tanah	ROO.21.01.08.08	3	2	6

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Barat					
Tahun Penilaian	2021					
Tujuan Strategis	Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi					
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan					
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance					
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
	Tidak tertanganinya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program provinsi	RSP.21.04.04.01	1	Kepala Dinas	Tidak adanya usulan proposal, SK Penetapan Bencana Provinsi, tidak terpenuhinya readiness criteria	Tidak tertanganinya rumah korban bencana dan relokasi program provinsi
	Belum terpenuhinya target terhadap PSU di kawasan permukiman	RSP.21.04.04.02	2	Kepala Dinas	Kurang Terkoordinasi dengan baik antar Provinsi dan Kab/Kota	Tidak terpenuhinya target pembangunan PSU di Kawasan Permukiman
	Penyelesaian proses administrasi pertanahan belum optimal	RSP.21.04.04.03	2	Kepala Dinas	Panjangnya waktu proses administrasi pertanahan	Terhambatnya proses administrasi pertanahan terhadap objek yang akan diselesaikan

II	Risiko Strategis Perangkat Daerah					
	Data perumahan dilokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi tidak valid	RSO.21.04.04.01	2	Kepala Bidang	Belum lengkapnya data rumah lokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi	Kurang optimalnya pendataan rumah lokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi
	Koordinasi pengembangan kawasan permukiman tidak optimal	RSO.21.04.04.02	2	Kepala Bidang	Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan kawasan permukiman	Terlambatnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik
	Dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP) Kab/Kota belum sesuai standar sehingga harus di tinjau ulang	RSO.21.04.04.03	3	Kepala Bidang	Kurang Akuratnya Kualitas dari Dokumen RP3KP	Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman belum optimal
	Tidak terlaksananya pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara optimal	RSO.21.04.04.04	3	Kepala Bidang	#REF!	#REF!
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah					
	Data perumahan dilokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi tidak valid	ROO.21.04.04.01	3	Kasi	Belum lengkapnya data rumah lokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi	Kurang optimalnya pendataan rumah lokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi

	Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi kurang optimal	ROO.21.04.04.02	2	Kasi	Kurangnya pemahaman peserta sosialisasi terkait perumahan dan kawasan permukiman	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi tidak optimal
	Kurangnya kualitas hasil pekerjaan fisik Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	ROO.21.01.08.03	4	Kasi	Kurangnya kompetensi tenaga terampil setempat	Rendahnya kualitas Rumah layak huni yang terbangun
	Koordinasi pengembangan kawasan permukiman tidak optimal	ROO.21.01.08.04	4	Kasi	Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan kawasan permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Kurang Optimal
	Terhambatnya Pelaksanaan Pekerjaan Kawasan Permukiman Kumuh	ROO.21.01.08.05	4	Kasi	1. Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan kawasan permukiman 2. Belum Memvalidasi Data RTLH Tiap Daerah	Tidak tercapainya target peningkatan kualitas PSU di kawasan permukiman Kumuh
	Terlambatnya Pelaksanaan Pekerjaan PSU	ROO.21.01.08.06	4	Kasi	Terlambatnya Proses perencanaan teknis	Tidak tercapainya target peningkatan kualitas PSU di kawasan permukiman

	terlambatnya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	ROO.21.01.08.07	3	Kasi	proses dan waktu tahapan penetapan lokasi pengadaan tanah tidak sesuai dengan aturan	tahapan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak tepat waktu
	tidak tercapainya penyelesaian sengketa tanah	ROO.21.01.08.08	6	Kasi	tidak tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa	terhambatnya proses penyelesaian sengketa tanah

PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

Nama Pemerintah Daerah		Provinsi Kalimantan Barat					
Tahun Penilaian		2021					
Tujuan Strategis		Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi					
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan					
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance					
Urusan Pemerintahan		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan					
No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b				c	d	e
I	Risiko Strategis						
	Tidak tertanganinya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program provinsi	RSP.21.04.04.01	SPM Perumahan Rakyat	SPM Tidak tercapai	Tersedianya anggaran untuk SPM	Kepala Daerah	1 Tahun Anggaran
	Belum terpenuhinya target terhadap PSU di kawasan permukiman	RSP.21.04.04.02	SOP PSU Kawasan Permukiman	SOP belum Terlaksana dengan baik	Penyempurnaan SOP PSU Kawasan Permukiman	Kepala Dinas	Triwulan I
	Penyelesaian proses administrasi pertanahan belum optimal	RSP.21.04.04.03	Peraturan dan perundang-undangan bidang pertanahan	kurangnya pemahaman pihak terkait terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan	Membuat Rancangan Pergub terkait dengan prosedur urusan pertanahan kewenangan provinsi	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
II	Risiko Strategis Dinas Perkim						
	Data perumahan dilokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi tidak valid	RSO.21.01.08.01	Database, evaluasi	belum terpenuhinya data secara keseluruhan	Tersedianya anggaran untuk pendataan	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran

	Koordinasi pengembangan kawasan permukiman tidak optimal	RSO.21.01.08.02	Dokumen RP3KP	Monitoring dan evaluasi	Melaksanakan pendampingan untuk koordinasi	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
	Dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP) Kab/Kota belum sesuai standar sehingga harus di tinjau ulang	RSO.21.01.08.03	konsistensi dalam Penetapan kewenangan provinsi untuk RP3KP	prosedur pengendalian penetapan kewenangan provinsi belum dilaksanakan	melakukan evaluasi kewenangan RP3KP Provinsi dengan Kabupaten /Kota	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
	Tidak terlaksananya pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara optimal	RSO.21.01.08.04	Rapat persiapan, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi	prosedur pengendalian belum terlaksana secara efektif	evaluasi terhadap prosedur pengendalian kegiatan fisik	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran

III	Risiko Operasional Dinas Perkim						
	Data perumahan dilokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi tidak valid	ROO.21.01.08.01	Database, evaluasi	belum terpenuhinya data secara keseluruhan	Tersedianya anggaran untuk pendataan	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
	Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi kurang optimal	ROO.21.01.08.02	Sosialisasi dan evaluasi	kurang pendampingan dan pemahaman terhadap peserta sosialisasi kegiatan	melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
	Kurangnya kualitas hasil pekerjaan fisik Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	ROO.21.01.08.03	Rapat persiapan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi	prosedur pengendalian belum terlaksana secara efektif	evaluasi terhadap prosedur pengendalian kegiatan fisik	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran

	Koordinasi pengembangan kawasan permukiman tidak optimal	ROO.21.01.08.04	Rapat Koordinasi Teknis OPD Perkim Se Kalbar	prosedur dalam penyusunan dokumen perencanaan belum dilaksanakan	Menindaklanjuti dari Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
	Terhambatnya Pelaksanaan Pekerjaan Kawasan Permukiman Kumuh	ROO.21.01.08.05	Rapat persiapan, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi	prosedur pengendalian belum terlaksana secara efektif	evaluasi terhadap prosedur pengendalian kegiatan fisik	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
	Terlambatnya Pelaksanaan Pekerjaan PSU	ROO.21.01.08.06	Rapat, koordinasi dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi	Melaksanakan pendampingan untuk koordinasi	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
	terlambatnya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	ROO.21.01.08.07	SOP tentang penetapan lokasi pengadaan tanah	belum terlaksananya SOP penetapan lokasi pengadaan tanah secara optimal	evaluasi atas implementasi SOP penetapan lokasi pengadaan tanah	Kasi	1 Tahun Anggaran
	tidak tercapainya penyelesaian sengketa tanah	ROO.21.01.08.08	SOP tentang penyelesaian sengketa tanah	belum terlaksananya SOP penyelesaian sengketa tanah secara optimal	evaluasi atas implementasi SOP penyelesaian sengketa tanah	Kasi	1 Tahun Anggaran

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Barat						
Tahun Penilaian	2021						
Tujuan Strategis	Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi						
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan						
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance						
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tersedianya anggaran untuk SPM	Rapat	Dinas Perkim/BPBD	Dinas Perkim, Bappeda, BKAD	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen
2	Penyempurnaan SOP PSU Kawasan Permukiman	Rapat	Dinas Perkim	Dinas Perkim, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen
3	Membuat Rancangan Pergub terkait dengan prosedur urusan pertanahan kewenangan provinsi	Rapat	Dinas Perkim	Dinas Perkim	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen

4	Tersedianya anggaran untuk pendataan	Rapat/koordinasi/surat dinas	Dinas Perkim/BPBD	Dinas Perkim/Bappeda/Biro Pemerintahan/BKAD	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen
5	Melaksanakan pendampingan untuk koordinasi	Rapat	Dinas Perkim/Bappeda	Dinas Perkim	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen
6	melakukan evaluasi kewenangan RP3KP Provinsi dengan Kabupaten /Kota	Rapat	Dinas Perkim/Bappeda	Dinas Perkim, Dinas PU, Bappeda	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen
7	evaluasi terhadap prosedur pengendalian kegiatan fisik	Rapat/surat edaran	Dinas Perkim	Dinas Perkim,	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen
8	Tersedianya anggaran untuk pendataan	Rapat/koordinasi/surat dinas	Dinas Perkim/BPBD	Dinas Perkim/Bappeda	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen
9	melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala	Rapat	Dinas Perkim,BPBD,Perangkat Desa	Dinas Perkim, Dinas PU, Bappeda,BPBD,Masyarakat	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen
10	evaluasi terhadap prosedur pengendalian kegiatan fisik	Rapat/surat edaran	Dinas Perkim	Dinas Perkim, Dinas PU	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen

11	Menindaklanjuti dari Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis	Rapat/surat edaran	Dinas Perkim	Dinas Perkim	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen
12	evaluasi terhadap prosedur pengendalian kegiatan fisik	Rapat/surat edaran	Dinas Perkim	Dinas Perkim	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen
13	Melaksanakan pendampingan untuk koordinasi	Rapat	Dinas Perkim/Bappeda	Dinas Perkim	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen
14	evaluasi atas implementasi SOP penetapan lokasi pengadaan tanah	Rapat/surat edaran	Dinas Perkim	Dinas Perkim	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen
15	evaluasi atas implementasi SOP penyelesaian sengketa tanah	Rapat/surat edaran	Dinas Perkim	Dinas Perkim	TW I / 2022	Februari 2022	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti, Dokumentasi berupa notulen